



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN BANJIR  
DAN GENANGAN AIR DI KOTA MALANG**  
(Studi Pada Dinas Pekerja Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan  
Kawasan Permukiman “DPUPRPKP” Kota Malang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

**TAUFAN EKA PRAMUDITA**  
NPM. 217.01.09.1.151



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRSI**  
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

Taufan Eka Pramudita, 2021, NPM 21701091151, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Banjir Dan genangan Air Di Kota Malang, Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Yaqub Cikusin, Dosen Pembimbing II : Hirshi Anadza, S.Hub. Int., M.Hub.Int.

---

Penelitian ini dilatar belakangi atas dasar permasalahan sistem saluran drainase yang tidak mampu menampung volume air saat terjadinya hujan. Hal ini dapat terjadi karena faktor tersumpalnya saluran drainase oleh sampah dan kapasitas saluran drainase dapat dikatakan kurang memadai, dan penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Dinas PUPRPKP Malang dalam penanggulangan banjir dan genangan air pada Dinas PUPRPKP Kota Malang. Faktor pendukung dan penghambat Dinas PUPRPKP Kota Malang dalam menjalankan kebijakan penanggulangan banjir dan genangan air.

Medote Penelitian ini dengan Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara metode pendekatan penelitian analisis kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran data secara menyeluruh kepada responden. Penelitian dalam hal ini mengumpulkan data berupa wawancara kepada responden dan diungkapkan dengan apa adanya sesuai bahasa dalam penelitian. Untuk teori implemntasi kebijakan dari George C. Edward III yang bersandar pada empat variabel Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur birokrasi.

Dari hasil penelitian ini bahwa dalam menjalankan kebijakan penanggulangan banjir karena saluran drainase Pemerintahan Kota Malang khususnya dinas PUPRPKP kota Malang mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12 Tahun 2014 yaitu Peningkatan, pemantauan dan pembersihan saluran drainase. Maksud dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan, dan memenuhi keandalan pelayanan, dan menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan.

Dinas PUPRPKP Kota Malang dalam melakukan kegiatan yang sudah ditetapkan, mereka konsistensi dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat ditunjukkan melalui kegiatan rutin yang mereka kerjakan untuk terus memantau perkembangan pada saluran drainase dan tetap menjaga fungsi drainase dengan baik. Terkait Stuktur Birokrasi yaitu Sekretaris Dinas PUPRPKP Kota Malang, Bidang Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan. Faktor Penghambat yaitu manusia yang masih saya membuang sampah (2) satgas hanya berjumlah 12 satgas di tahun 202, adanya komunikasi yang baik dari setiap intasi, aparat Negara dan masyarakat dalam penanggulangan banjir dan genangan air.

**Kata Kunci : Implementasi, Drainase, Sampah**

## SUMMARY

Taufan Eka Pramudita, 2021, NPM 21701091151, Study Program of State Administration, Faculty of Administrative Sciences, Malang Islamic University, Policy Implementation in Overcoming Floods and Waterlogging in Malang City, Advisor I : Prof. Dr. Yaqub Cikusin, Advisor II : Hirshi Anadza, S.Hub. Int., M.Hub.Int.

---

---

This research is based on the problem of the drainage system that is not able to accommodate the volume of water when it rains. This can happen because the drainage channel is clogged with garbage and the capacity of the drainage channel is inadequate, and this study aims to find out and describe the implementation of the Malang City PUPRPKP policy in dealing with flooding and puddles at the Malang City PUPRPKP Office. Supporting and inhibiting factors of the Malang City PUPRPKP Office in carrying out flood and waterlogging prevention policies.

This research method with The research method used is using qualitative research methods by means of a qualitative analysis research approach intended to obtain a comprehensive picture of the data to the respondents. Research in this case collects data in the form of interviews with respondents and is expressed as it is according to the language in the study. For the theory of policy implementation from George C. Edward III which relies on four variables, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic structure.

From the results of this study, in carrying out flood prevention policies, the Malang City Government drainage channel, especially the Malang City PUPRPKP service, refers to the Regulation of the Minister of Public Works No. 12 of 2014 namely Improvement, monitoring and cleaning of drainage channels. The purpose and objective of this regulation is to realize the implementation of an urban drainage system that meets the requirements of orderly administration, technical provisions, is environmentally friendly, and meets service reliability, and creates a healthy and free of puddle residential environment.

The Malang City PUPRPKP Service in carrying out the activities that have been determined, they are consistent in their implementation. This can be shown through the routine activities they carry out to continuously monitor developments in the drainage channel and maintain a good drainage function. Related to the Bureaucratic Structure, namely the Secretary of the Malang City PUPRPKP Office, in the Field of Water Management and Urban Drainage. Inhibiting factors are people who I still throw away trash, task force only amounting to 12 task forces in 2021, good communication from each agency, state apparatus and the community in overcoming floods and puddles.

**Keywords: Implementation, Drainage, Garbage**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah yang dinyatakan rawan terhadap bencana alam. Bencana alam adalah fenomena alam yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan menghancurkan lingkungan yang akhirnya timbulah korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan bangunan yang telah dibangun. Bencana alam terjadi karena eksploitasi sumber daya alam tanah, hutan, dan air yang berlebihan serta adanya perubahan cuaca atau iklim global sehingga dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan serta meningkatnya laju erosi dan sedimentasi. Salah satu fenomena alam yang menimbulkan kerugian besar yang selalu mengancam saat turunnya curah hujan beberapa wilayah di Indonesia adalah bencana banjir.

Banjir bisa dikatakan adalah fenomena alam yang biasa namun, banjir dapat menjadi hal yang merugikan jika mengancam keberadaan hidup manusia. Banjir dan genangan air memiliki perbedaan yaitu perbedaan pada ketinggian permukaan air, secara normal genangan air hanya memiliki tinggi kurang dari 40 cm kecuali jika ada hal-hal yang mempengaruhinya dan banjir memiliki ketinggian lebih dari 40 cm (diakses pada 12 September 2021 dari [news.detik.com/berita/banjir/siaga](https://news.detik.com/berita/banjir/siaga)). Bencana banjir dipengaruhi oleh faktor alam yaitu curah hujan di atas normal, selain curah hujan tinggi yang dapat mengakibatkan adanya banjir faktor ulah manusia juga dapat mengakibatkan terjadinya bencana banjir.

Dari berbagai banjir yang ada di daerah Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan alam dan tata ruang, peristiwa alam seperti kenaikan permukaan air laut, badai, curah hujan tinggi bahkan curah hujan rendah juga dapat mengakibatkan banjir kecil atau disebut dengan genangan air, dan kerusakan lingkungan, pembangunan yang mengakibatkan penyempitan alur sungai. Banjir juga dapat merusak area persawahan yang tergenang air sehingga

dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen, merusak perumahan dan permukiman, merusak fasilitas umum dan prasarana masyarakat dan dapat menelan korban jiwa. Permasalahan banjir bukan hanya tugas bagi pemerintah, akan tetapi partisipasi masyarakat dalam menanggulangi banjir dan genangan air sangat nyata terutama dalam gerakan tanggap darurat. Bencana banjir juga menyebabkann pengeluaran pemerintah tanpa terduga, pengeluaran tersebut terutama untuk memulihkan fasilitas umum ataupun prasarana publik yang rusak karena bencana banjir.

Kota Malang merupakan Kota terbesar di Jawa Timur yang sering dilanda banjir dan banyaknya genangan air. Penanganan banjir dan genangan air di kota Malang dilakukan oleh beberapa instansi, salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) dalam kaitannya dengan penanggulangan banjir dan genangan air. Dinas PUPRPKP berperan dalam penataan, merencanakan, dan membangun infrastruktur yang nantinya berfungsi mengatasi banjir dan genangan air.

Masalah banjir dan genangan air di kota Malang sering terjadi pada musim hujan meskipun kota Malang secara georafis terlatak di dataran tinggi yang seharusnya kecil kemungkinan terjadinya banjir. Faktor Banjir di Kota Malang terjadi tidak hanya saat turunnya curah hujan yang tinggi akan tetapi faktor lainnya adalah diakibatkan oleh resapan air yang berkurang karena alih fungsi lahan besar-besaran di Kota Malang. Banjir dan genangan air yang melanda kota Malang dalam 4 tahun terakhir menjadi masalah yang cukup merugikan masyarakat kota Malang, karena musim hujan yang sebelumnya membuat kota Malang menjadi sejuk akan tetapi untuk saat ini justru menimbulkan kecemasan. Musim hujan membuat kenyamanan warga kota Malang menjadi terganggu akibat munculnya ancaman banjir dan genangan air di kota Malang dan dampak hujan deras datang menguyur kota Malang yang mengakibatkan banjir dan genangan air membuat beberapa ruas jalan menjadi macet total.



| Tahun        | Jumlah Titik Banjir                 | Sumber Banjir                               |
|--------------|-------------------------------------|---|
| 2018         | 59 Titik Banjir                     | - Curah Hujan Tinggi<br>- Dominasi Sampah   |
| 2019         | 26 Titik Banjir                     | - Curah Hujan                               |
| 2020         | 25 Titik banjir                     | - Sumbatan Sampah<br>- Sumbatan drainase    |
| Januari 2021 | Titik Banjir Bertambah<br>11 Lokasi | - Curah Hujan Tinggi<br>- Sumbatan Drainase |

**Tabel 1.1. Jumlah titik dan sumber banjir di kota Malang**

Sumber : PemKot Malang Petakan Wilayah dan Titik Banjir tersedia di

<http://jatimtimes.com> diakses 2021

Dari tabel 1.1 dapat terlihat bahwa banjir dan genangan air di kota Malang mengalami kenaikan meskipun di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 29 titik banjir dan genangan air yang disebabkan oleh curah hujan tinggi yang sebelumnya di tahun 2018 terdapat 59 titik yang besumber dari curah hujan tinggi yang didominasi karena sampah yang terbuang sembarangan. Pada Tahun 2020 jumlah banjir di kota Malang berjumlah 25 titik banjir, hal ini disebabkan oleh tersumbatnya saluran drainase oleh sampah. Dari penurunan tersebut pada 2021 titik banjir dan genangan air di kota Malang bertambah 11 lokasi salah satu sumber banjir dan genangan air karena faktor tersumbatnya drainase dan curah hujan tinggi, jadi pada tahun 2021 jumlah banjir di kota Malang menjadi 36 titik banjir. Banjir merupakan masalah serius yang harus di tangani oleh pemerintah dan masyarakat dengan kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya.

Dengan bertambahnya titik banjir di Kota Malang di awal tahun 2021 terdapat 1 warga kota Malang yang di nyatakan hilang karena terbawa arus banjir. Kota Malang pada awal bulan Januari 2021 memiliki curah hujan yang tinggi dengan curah hujan 360 mm. Curah hujan terbagi menjadi (3) tiga kategori yaitu rendah (0-100 mm), menengah (100-300 mm), tinggi (300-500 mm), sangat tinggi (>500 mm) (diakses di <http://bmgkotamalang.netnormal/hujan/bulanan> pada tanggal 1/12/2021).

Gambar 1.1. Titik Rawan Banjir Kota Malang 2021



Gambar 1.1. Titik Rawan Banjir Kota Malang 2021

Sumber : PemKot Malang Petakan Wilayah dan Titik Banjir tersedia di

<http://jatimtimes.com> diakses 2021

Pada gambar 1.1 kota Malang memiliki 5 kecamatan, dari 5 kecamatan yang ada di kota Malang masing-masing kecamatan memiliki titik yang dinyatakan rawan banjir yaitu kecamatan Lowokwaru : jl. Sarangan, jl. Soekarno-Hatta 2) kecamatan Blimbing : jl. Raya Sulfat 3) kecamatan Klojen : jl. Bareng 2A dan 2G, jl. Bukit barisan, jl. Galunggung, jl. Kawi, jl. Semeru Gg 4 kasin Rw 4, jl. HOS Cokroaminoto 4) kecamatan Sukun : jl. Candi, jl. Ir Rais Gg 9, jl. Pertigaan bandulan Barat, jl. Simpang Sukun Timur Cokroaminoto 5) kecamatan Kedungkandang : jl. Ranau, jl. maninjau Raya, jl. Danau Toba, jl. Ranau Granti, jl. Buring .Dari 20 titik rawan Banjir kecamatan Klojen dan kecamatan Sukun terdapat 6 titik rawan banjir hal ini lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di kota Malang.

Penyebab banjir dan genangan air di kota Malang terjadi karena adanya pembangunan yang dilakukan tidak berwawasan lingkungan dalam arti pembangunan tersebut berada pada bantaran sungai atau tepi sungai yang mengakibatkan luas sungai menjadi jadi sempit hal ini menjadikan volume air

sungai pada saat curah hujan meluap. Pada daerah padat penduduk di daerah Sawojajar Kecamatan Kedungkandang resapan air yang ada masih belum mampu menyerap dengan baik dan kurangnya pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) sehingga RTH yang berfungsi sebagai daerah resapan tidak dapat difungsikan karena penuhnya lahan dengan permukiman. Kedua, terjadinya banjir dan genangan air diakibatkan pada pola hidup masyarakat yang buruk, dimana masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya yang mengakibatkan penyumbatan pada selokan ataupun resapan air yang sudah di buat. Dalam penanggulangan bencana adalah bagian internal dari pemerintah. Pemerintah sangat bertanggung jawab terhadap terselenggaranya penanggulangan bencana dalam hal sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana seharusnya dan juga menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsian yang terkena bencana sesuai dalam standar pelayanan harus segera mungkin diupayakan.

Setelah melakukan observasi dan wawancara pertama kepada ibu Reni masyarakat Kota Malang yaitu "banjir dan genangan air di kota Malang sudah menjadi hal yang umum untuk saat ini meskipun berbagai cara sepertinya sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam mengatasi permasalahan banjir dan genangan air yang mengganggu aktivitas masyarakat Kota Malang dan untuk saat ini permasalahan tersebut tak kunjung selesai"ucapnya (pada 2/01/2021). Pandangan tentang banjir dan genangan air di kota Malang belum membawa hasil sampai saat ini dikarenakan banjir dan genangan air terus merambah ke titik-titik yang dulunya tidak pernah dan bahkan jarang terjamah oleh banjir.

Maevin Indra sebagai masyarakat menyampaikan "upaya penanggulangan bencana di kota Malang perlu dimulai dengan adanya kebijakan pemerintah kota dalam menanggulangi bencana khususnya bencana banjir sesuai dengan peraturan yang sudah ada, akan tetapi hal ini harus disesuaikan dengan kondisi daerah"ucapnya (pada tanggal 5/01/2021). Dalam penanggulangan bencana harus berjalan dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi, dan operasi yang mencakup pemerintah kota, maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana upaya yang dalam penanggulangan banjir khususnya di



pemerintahan kota Malang. Di sisi lain pemerintah perlu adanya sosialisasi terkait bencana khususnya bencana banjir, hal ini bertujuan untuk mencegah, menyiapkan masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan saat bencana benar-benar terjadi sehingga dapat mengurangi risiko korban jiwa dan program pemerintah dalam menanggulangi banjir dan genangan air dapat berjalan dengan baik agar warga Kota Malang tidak mencemaskan adanya banjir dan genangan air pada saat hujan tinggi datang.

Melihat fenomena yang terjadi di kota Malang dalam upaya menanggulangi banjir dan genangan air, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Banjir dan Genangan Air Di Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas PUPRKP Kota Malang)**”.

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan atas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan dalam penanggulangan banjir dan genangan air pada Dinas PUPRKP Kota Malang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Dinas PUPRKP Kota Malang dalam menjalankan kebijakan penanggulangan banjir dan genangan air ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Dinas PUPRKP Malang dalam penanggulangan banjir dan genangan air pada Dinas PUPRKP Kota Malang.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Dinas PUPRKP Kota Malang dalam menjalankan kebijakan penanggulangan banjir dan genangan air.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagai wacana dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai judul tema sama atau hampir sama dengan penelitian ini, maka suatu penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca, yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua antara manfaat teoretis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Secara Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dijadikan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta diharapkan dapat memberi manfaat guna menambah ilmu tentang implementasi kebijakan dalam penanggulangan banjir dan genangan air di kota Malang pada Dinas PUPRPKP Kota Malang agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengurangan bencana banjir.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

Peneliti mengharapkan hasil yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam tanggung jawab Korporasi terhadap terjadinya bencana banjir di kota Malang serta dapat digunakan sebagai referensi bagi para akademisi maupun masyarakat umum agar bertambahnya wawasan terkait permasalahan yang terjadi pada tentang implementasi kebijakan Pemkot dalam penanggulangan banjir dan genangan air di kota Malang untuk mengetahui langkah dari kebijakan Malang dalam bencana banjir yang bertambah di setiap wilayah kota Malang.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yaitu uraian secara singkat dari seluruh rangkaian pembahasan yang disusun untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui dan memahami isi yang dijabarkan dalam penyusunan skripsi ini. Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pembahasan mengenai penyusunan skripsi yang di dalamnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka merupakan konsep dasar mengenai teori-teori yang berhubungan dengan judul dalam penulisan skripsi ini. Teori dalam tinjauan pustaka sebagai acuan dalam penelitian yang berhubungan dengan implementasi kebijakan dalam penanggulangan banjir dan genangan air.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

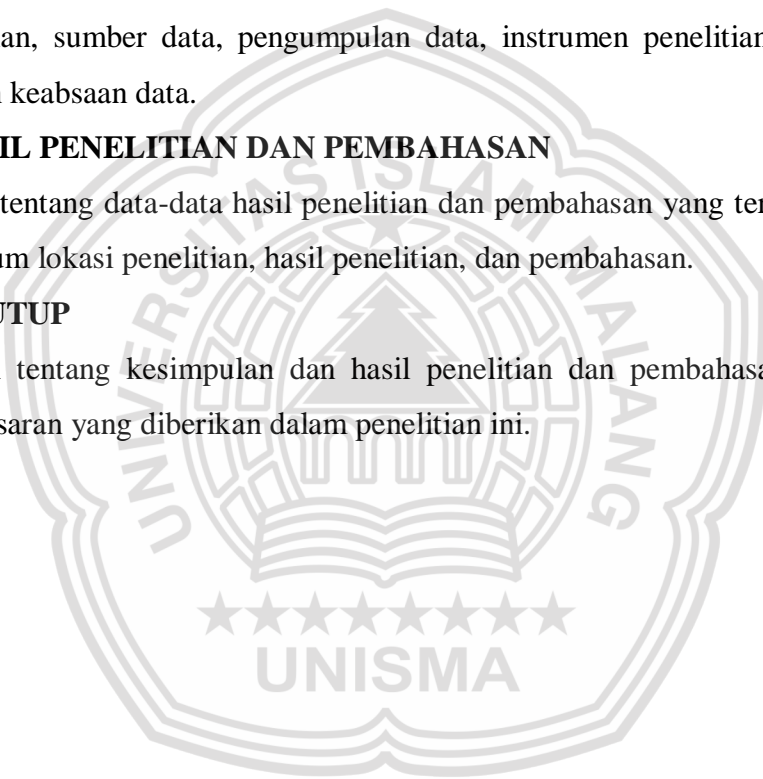
Bab ini berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, terdapat beberapa komponen yaitu, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik penelitian, dan keabsaan data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang data-data hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian dan pembahasan, serta berisi tentang saran yang diberikan dalam penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada pada sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan secara umum bahwa dinas PUPRPKP hanya menanggulangi sebelum dan sesudah banjir dan genangan air bukan saat terjadinya banjir. Dalam Implementasi kebijakan dalam penanggulangan banjir dan genangan air.

Dalam penyelenggaraan program pembangunan drainase sendiri mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Pelaksana dari program pembangunan drainase sendiri dilakukan oleh Dinas PUPRPKP seksi drainase kota Malang. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menganut sistem pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah perkotaan.

Dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Dinas PUPRPKP dalam penanggulangan banjir yang diakibatkan tersumpalnya sistem drainase oleh sampah hal yang dilakukan Dinas PUPRPKP dalam menjalankan Implementasi Kebijakannya seperti intasi Dinas PUPRPKP saja akan tetapi juga melibatkan instansi lainnya. Dengan komunikasi yang terjalin keterlibatan instansi lain dalam memelihara dan menjaga Kota Malang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari Implementasi tersebut. Semua organisasi termasuk Dinas PUPRPKP Kota Malang sangat membutuhkan Sumberdaya, Dinas PUPRPKP Kota Malang dalam menjalankan Implementasi kebijakan bisa berjalan dengan adanya dukungan dari Sumber daya manusia dan juga sumber daya keuangan. 1) Sumber Daya Manusia (SDM), dalam sumber daya manusia Dinas PUPRPKP dalam menjalankan implementasi kebijakan belum bisa di katakan berhasil karena faktor kekurangan SDM di satgas pemeliharaan saluran drainase karena satgas untuk tahun 2021 hanya berjumlah 12 satgas. 2) Sumber Daya Keuangan, Sumber Daya Keuangan atau bisa disebut anggaran adalah salah hal yang dibutuhkan dalam

sarana dan perasana dalam peningkatan, pemeliharaan, pembangunan saluran drainase melalui APBD.

Dinas PUPRPKP Kota Malang dalam melakukan kegiatan yang sudah ditetapkan, mereka konsistensi dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat ditunjukkan melalui kegiatan rutin yang mereka kerjakan untuk terus memantau perkembangan pada saluran drainase dan tetap menjaga fungsi drainase dengan baik. Adapun tingkat pengaduan untuk Dinas PUPRPKP kota Malang yang diukur melalui pelaporan masyarakat terkait titik-titik banjir dan genangan air salah satunya melalui sambat online meskipun dalam faktor kejujuran Dinas PUPRPKP belum mengoptimalkan hal tersebut ke masyarakat Kota Malang. Struktur organisasi sangatlah berpengaruh bagi Dinas PUPRPKP dalam menjalankan kebijakan seperti norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi di internal birokrasi. Terkait Struktur Birokrasi yaitu Sekretaris Dinas PUPRPKP Kota Malang, Bidang Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan, Unit Pelaksana Teknis memiliki sifat yang terbuka dan transparan. Dengan demikian Dinas PUPRPKP Kota Malang melakukan kerjasama dengan struktur organisasi lainnya untuk menyelesaikan permasalahan banjir dan Genangan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas Dinas PUPRPKP menjalankan implementasi kebijakan dengan baik dengan menerapkan model implementasi kebijakan, meskipun ada beberapa kendala dalam penerapan tersebut yaitu Sumber Daya Manusia dan kejujuran dalam menjalankan kebijakan tersebut seperti dengan mempublik anggaran yang untuk saluran drainase kepada masyarakat.

Faktor yang menghambat dalam menjalankan kebijakan Dinas PUPRPKP yaitu faktor Internal dan Eksternal. Eksternal antarlain masih banyaknya Sampah dalam hal ini, sampah masih dikatakan sebagai faktor utama dalam ada genangan air dan banjir di kota Malang diakibatkan oleh ulah manusia yang masih saya membuang sampah pada saluran drainase, faktor tata ruang yang ada saat ini di kota Malang yang mengalami perubahan dan juga titik banjir ada yang daerah tersebut masih sedikit saluran drainasenya membuat dinas PUPRPKP kota Malang melakukan pembangunan terkendala tanah milik masyarakat.



Faktor Penghambat Internal adalah satgas pemeliharaan yang hanya berjumlah 12 satgas di tahun 2021, hal ini sangat tidak efektif karena ditahun 2021 ada 26 titik banjir yang ada di kota Malang karena masalah tertumpuknya sampah.

Dan faktor pendukungnya yaitu Dinas PUPRPKP dalam menjalankan kebijakan penanggulangan banjir dan genangan air yaitu anggaran APBD yang sudah ditetapkan, Adanya komunikasi yang baik dari setiap intasi, aparat negara dan masyarakat dalam mewujudkan kota Malang terhidar dari banjir dan genangan air.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas yang telah disajikan oleh penulis mengenai Implementasi kebijakan PemKot Malang Dalam Penanggulangan Banjir Dan Genangan Air, penulis memberikan saran bagi Dinas PUPRPKP Kota Malang dan bagi peneliti berikutnya.

Saran untuk Dinas PUPRPKP Kota Malang agar dalam menjalankan implementasi kebijakan terkait penanggulangan banjir berjalan dengan baik yaitu pertama, tentang Sumber Daya Manusia (SDM) perlu adanya penambahan satgas dalam sistem drainase agar banyak satgas yang bertugas makin cepat masalah drainase yang mengakibatkan banjir dan genangan air. Kedua, adanya kebijakan baru yang diusulkan oleh Dinas PUPRPKP Kota Malang melalui kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Malang agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan terutama pada saluran drainase yang membuat saluran tersebut tidak berjalan dengan baik. Ketiga, ada sosialisasi terkait penanganan banjir dan genangan air karena faktor drainase tersebut agar masyarakat bisa menjadi orang pertama yang menanggulangi saluran drainase tersebut tidak mengandalkan pemerintah.

Dari hasil penelitian dan penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **Implementasi Kebijakan Dalam penanggulangan Banjir Dan Genangan Air Di Kota Malang**. Maka dari itu, saran dari penulis untuk peneliti berikutnya agar dapat melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Banjir dan Genangan Air Di Kota Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Affifuddin, S.Ag.,M.Si, 2015, *pengantar administrasi pembangunan : Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*, Bandung, Afabeta.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*.Malang Nugroho, D.Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sabarguna, S.Boy. 2005. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press. Sahya Anggara. 2016. *Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Waham, Solichin Abdul. 1999. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi keImplementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Waham, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

### Sumber Skripsi :

- Farida Amalia, (2019). *Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Menanggulangi Banjir di Perumahan Kembar Lestari 2 Kota Jambi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Vera Yanti, (2020). *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di kecamatan Pamulang Kota Tangerang (Studi kasus Perumahan Bukit Pamulang Indah dan Perumahan Lembah Pinus)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Budi Santosa, (2018). *Implementasi Program Pembangunan Drainase DiKota Medan*, Universitas Sumatra Utara.

### Sumber Jurnal Elektronik :

- Agni Musa, (2018). *Evaluasi Kebijakan Penanganan Banjir dan ROB Di Kota Semarang*, Universitas Diponegoro.

- Bambang Kusbandrijo, (2014). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penanganan Banjir (Studi di Dinas Bina Marga dan Pematusan)*. 397-1139-PB.pdf
- Novan Suryadi, (2020). *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda, Universitas Mulawarman Samarinda. Ejournal ilmu pemerintahan 2020*, 8(2):425-436.
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik. In *FISIP Universitas Moetopo Beragama (pers)*. FISIP Universtas Moestopo Beragama (Pers).

#### Sumber Internet :

- Afirina. 2021. *PemKot Malang Petakan Wilayah dan Titik Banjir*. Diakses dari <https://jatimtimes.com/pemkot-malang-petakan-wilayah-dan-titik-banjir>, pada tanggal 26-1-2021 pukul 18.21 WIB.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan :Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Adminstrasi Publik* <https://media.neliti.com/media/publications97794-ID-implementasikebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Amanda, P. I. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1, 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Arry Pongtiku, Voni Heni Rerery, Y. R. (2017). *BUKU METODOLOGI KUALITATIF SAJA* (Arry Pongtiku (ed.); Vol. 2016, Issue December).Nulisbuku.com.<https://www.researchgate.net/publication/321758646>
- ELSAM (Refrensi Ham), 2014. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencan*. Diakses dari <https://referensi.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-24-tahun-2007-tentang-penanggulangan-bencana/>, Pada tanggal 26-1-2021 pukul 19.20 WIB.
- DPUPRKP Kota Malang diakses dari <https://dpuprpkp.malangkota.go.id> 23.03 WIB
- Johan Cendon.2017. *Model-Model Analisi Data*. Diakses di <https://metopenkomp.blogspot.com/2017/11/model-model-analisis-data.html> pada tanggal 21-2-2021 pukul 01.32 WIB.

Kementrisn Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan*. Diakses di <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/329/1> pada pukul 12.30

Twitter, @Ngalamlop. *Titik Banjir Kota Malang tahun 2021*. Diakses dari <https://twitter.com/> pukul 21.21 WIB

Vina Arizka, 2020. *Model-model Politik Eatson*. Diakses dari <https://brainly.co.id/tugas/37102688>, pada tanggal 25-1-2021 pukul 17.00 WIB.

